



Mahkamah Agung Republik Indonesia
The Supreme Court of the Republic of Indonesia

PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
SIDANG ISTIMEWA LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA, TAHUN 2021
Jakarta, 22 Februari 2022

ADDRESS OF THE CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME
COURT AT THE ANNUAL REPORT SPECIAL SESSION
OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA 2021
Jakarta, 22nd February 2022





Mahkamah Agung Republik Indonesia

The Supreme Court of the Republic of Indonesia

**PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
SIDANG ISTIMEWA LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA, TAHUN 2021
Jakarta, 22 Februari 2022**

**ADDRESS OF THE CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME
COURT AT THE ANNUAL REPORT SPECIAL SESSION
OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA 2021
Jakarta, 22nd February 2022**



Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung RI
Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia

*Bismillahirrohmannirrohiim,
Assalamu'alaikum warohmatullahi
wabarokatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.*

*Bismillahirrohmannirrohiim,
Assalamu'alaikum warohmatullahi
wabarokatuh,
Good tidings to us all,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.*

- Yang Kami Hormati dan Kami Muliakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo;
- Yang Kami Hormati dan Kami Muliakan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak K.H. Ma'ruf Amin;
- Yang Saya Hormati Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara;
- Yang Mulia Para Ketua Mahkamah Agung Negara-Negara Sahabat;
- Yang Saya Hormati Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jaksa Agung dan Kapolri;
- Yang Saya Muliakan Para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, beserta Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional dan Mitra Pembaruan Mahkamah Agung;
- Yang Kami Muliakan para Purna Bakti Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama di seluruh Indonesia;
- Your Excellency, the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo;
- Your Excellency, Vice President of the Republic of Indonesia K.H. Ma'ruf Amin;
- Distinguished Heads of High State Institutions;
- The Honorable Chief Justices of the Supreme Court of Foreign State Friends;
- Your Excellencies, Ministers in the Indonesia Maju Cabinet, Commander of the Indonesia National Armed Forces, Attorney General and Chief of National Police;
- Your Excellencies the Ambassadors of our Foreign State Friends, and Representatives of International Organizations and Development Partners of the Supreme Court;
- The Honorable Former Leaderships and Justices of the Supreme Court, High Court Judges, Appellate Court Judges, and First Instance Court Judges from all of Indonesia;

- Yang Kami Hormati, Ketua Umum Darmmayukti Karini dan Ketua Dharmmayukti Karini Mahkamah Agung beserta jajarannya;
- Yang Kami Hormati, Para Pimpinan Redaksi, Jurnalis dan Wartawan dari Media Cetak, Media Elektronik dan Media Online;
- Yang Kami Hormati Para Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia;
- Warga Peradilan di seluruh Indonesia yang menyaksikan secara virtual, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga ke Pulo Rote, serta hadirin semua yang saya banggakan,
- Distinguished Chairperson of Darmmayukti Karini and Chairperson of Dharmmayukti Karini of the Supreme Court and officials;
- Distinguished Editors in Chief, Journalists, and Reporters from the printed, electronic and online media;
- Distinguished Rectors and Leaderships of Indonesian Universities;
- The Judicial Community of Indonesia virtually participating in this event from Sabang to Merauke, from Miangas to Pulo Rote, ladies, and gentlemen,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelenggarakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Tahun 2021, meskipun masih diliputi oleh suasana pandemi Covid-19.

Berkenaan dengan hal itu, maka seluruh rangkaian acara Prosesi Laporan Tahunan ini dilaksanakan sesuai standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, dengan pengukuran suhu tubuh dan pemeriksaan swab antigen bagi seluruh peserta akan masuk ke ruangan prosesi, pembagian lokasi dan pengaturan jarak, serta

We praise God Almighty , as it is upon His blessing and grace that we are able to convene this annual event, namely the delivery of the Supreme Court 2021 Annual Report, despite being amid the Covid-19 pandemic;

In light of this situation, the entire agenda of the Annual Report Proceeding is conducted in strict compliance with the Covid-19 safeguard protocols, with body temperature measurement and antigen swab test performed on all guests coming into the event venue, designation of seating, and maintenance of safe distance,

penggunaan atribut-atribut kesehatan, seperti masker, sarung tangan, dan faceshield untuk menjamin keamanan dan keselamatan bagi seluruh peserta yang hadir.

Seperti halnya tahun yang lalu, penyelenggaraan Laporan Tahunan kali ini, masih dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring), yaitu Para Pimpinan Hakim Agung, Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung dan Pejabat Eselon I, melaksanakan prosesi dari Ruang Profesor Kusumaatmadja, lantai 14 Gedung Mahkamah Agung. Bagi Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama se-wilayah hukum DKI Jakarta mengikuti prosesi dari Balairung Lantai I, Gedung Mahkamah Agung, sedangkan para undangan dan warga peradilan di seluruh Indonesia mengikuti melalui saluran *live streaming* dari tempat masing-masing.

Sebelum saya menyampaikan materi Laporan Tahunan ini, izinkan saya atas nama Pimpinan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta seluruh undangan, baik yang ada di dalam negeri, maupun yang

and mandatory use of health protection attributes such as face masks, gloves, and face shields to ensure the health and safety of all attendees.

As with last year's event, this year's Annual Report delivery is being conducted in a hybrid manner (online and offline), with the senior leadership of the Supreme Court, Ad-Hoc Justices, and Echelon I Officials attending the procession at the Profesor Kusumaatmadja hall, at 14th floor of the Supreme Court Building. Chairpersons of the Appellate Courts and First-Instance Courts in Jakarta attend the Auditorium on the 1st floor of the Supreme Court Building. At the same time, invitees and the judicial community from all over Indonesia follow the event through live streaming at their respective locations.

Before I deliver this year's Annual Report, please allow me on behalf of the leadership of the Supreme Court and Judicial Bodies to express my highest appreciation and gratitude for the presence of the President and Vice President of the Republic of Indonesia, as well as all invitees who are currently within the country and abroad. Although we cannot shake hands and see each other in person, I truly hope that the

ada di luar negeri, sekalipun kita tidak bisa berjabat tangan dan bertatap muka secara langsung, namun saya berharap semua ini tidak mengurangi makna, serta nilai kehidmatan dari pelaksanaan acara Laporan Tahunan ini.

Sudah menjadi kewajiban bagi Mahkamah Agung sebagai institusi publik, untuk menyampaikan segala capaian kinerja yang dilakukan selama kurun waktu satu tahun, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi upaya perbaikan ke depannya.

Hadirin yang saya hormati,

Dua tahun kita telah menjalani masa-masa sulit yang diakibatkan oleh munculnya wabah pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, bahkan sampai saat ini wabah tersebut masih ada di tengah-tengah kita. Gelombang demi gelombang datang silih berganti, seiring dengan munculnya varian-varian baru yang mengancam keselamatan umat manusia. Segala bentuk aktivitas fisik dan interaksi sosial terpaksa harus dibatasi untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 yang menyebar secara masif di kalangan penduduk Indonesia.

Musibah pandemi telah berdampak pada seluruh bidang kehidupan manusia, tidak terkecuali juga dirasakan oleh dunia peradilan. Namun, di tengah kesulitan yang

situation will not diminish the significance and solemnity of this Annual Report proceedings.

It is the duty of the Supreme Court as a public institution to disclose all of its achievements and performance during the past year as a form of accountability to the public and to serve as material for evaluation to improve its performance moving forward.

Distinguished ladies and gentlemen,

The past two years have been a great struggle for us due to the emergence of the Covid-19 pandemic at the beginning of 2020, which is still plaguing us today. Wave after wave of hardship has hit us, with the emergence of variants of the disease that put human health at the most significant risk. All physical activities and social interactions had to be restricted to sever the transmission of Covid-19 that has spread massively through the country's population.

The disaster that is the pandemic affects all segments of people's lives, with the judicial sector not being excluded. Amidst the difficult situation, we are struggling

sedang kita hadapi saat ini, banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya. *“Dalam setiap musibah pasti ada kesulitan, namun di balik kesulitan selalu ada peluang.”* Ungkapan tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh seorang Negarawan Inggris, bernama **Winston Churchill**, beliau mengatakan *“Orang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan, sedangkan orang optimis melihat kesempatan di setiap kesulitan.”* Semangat tersebut kemudian melandasi sikap Mahkamah Agung dalam menghadapi tantangan di masa pandemi saat ini, yaitu **“Mengambil peluang dari sebuah kesulitan, untuk membuat perubahan secara fundamental.”**

Dulu ketika masih dalam kondisi yang normal, kita tidak pernah membayangkan bahwa proses migrasi dari sistem peradilan konvensional ke sistem peradilan elektronik dapat dilakukan hanya dalam waktu 2 (dua) tahun, namun dengan adanya pandemi, semua itu dapat dilakukan. Inilah yang saya sebut sebagai **“hikmah di balik datangnya musibah.”**

Hadirin yang saya muliakan,
Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Tahun 2021 ini mengusung tema: **“AKSELERASI PERWUJUDAN PERADILAN MODERN.** Tema tersebut merupakan rangkaian estafet dari tema-tema sebelumnya yang mengisyaratkan tentang sebuah tekad, semangat, serta optimisme dari seluruh

through. However, there are many lessons that we can learn. *“With every disaster, there comes difficulty. But behind every difficulty, there lies an opportunity.”* This expression echoes the statement of the English statesman **Winston Churchill**, who famously said, *“A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.”* This spirit also underlies the Supreme Court’s attitude in facing the challenges brought forth by the current pandemic, namely to **“seize the opportunity presented by a difficult situation to introduce fundamental changes.”**

Back when the situation was still normal, we would never have imagined that the migration of the judicial system from the conventional method to an electronic one would be achieved within two years. However, thanks to the pandemic, this is precisely what happened. This is what I was referring to as **“the blessing behind the disaster.”**

Distinguished guests,
The 2021 Supreme Court Annual Report carries the theme of **“ACCELERATING THE MANIFESTATION OF THE MODERN JUDICIARY.”** The theme is a continuation of past themes that implies a commitment, a spirit, and an optimistic outlook adopted by all personnel of the Supreme Court and

aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk mampu bergerak cepat, merespons serta beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini.

Peradilan modern adalah proses metamorfosa sebagai akibat dari keniscayaan atas kemajuan teknologi. Pondasinya telah dibangun jauh sebelum datangnya pandemi, yaitu sejak pemberlakuan aplikasi E-Court pada tahun 2018. Tidak dapat dipungkiri bahwa percepatan pemberlakuan sistem peradilan elektronik dipengaruhi oleh situasi darurat akibat munculnya pandemi Covid-19 yang membatasi pertemuan-pertemuan fisik di ruang sidang, namun secara tidak langsung juga telah mempercepat implementasi dari rencana kerja yang termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Tahun 2021 merupakan tahun akselerasi bagi perwujudan peradilan modern melalui pemenuhan sarana IT dan sumber daya manusia. Mahkamah Agung memiliki 910 satuan kerja pengadilan, ditambah dengan 13 pengadilan tingkat banding yang baru, tentu bukan persoalan mudah untuk memenuhi standar Sarpras IT yang sama pada seluruh satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki Mahkamah Agung.

all the Judicial Bodies to move rapidly, to respond, and adapt to the dynamics of social changes and technological advancements that are speeding on as we speak.

A modern judiciary entails a metamorphosis arising from inevitability of technological progress. The foundation has been laid down far before the onslaught of the pandemic, namely since the rollout of the E-Court application in 2018. It is undeniable that the accelerated adoption of an electronic judicial system has been driven by the urgency created by the Covid-19 pandemic that restricts physical engagements in the courtrooms, but which also quickened the implementation of the work plans established in the 2010-2035 Justice Reform Blueprint.

2021 had been an accelerated year in creating a modern judiciary through the provision of IT facilities and human resources. The Supreme Court has 910 courts under its auspices, in addition to 13 new appellate courts. Consequently, it is by no means an easy feat to establish IT facilities of uniform standards throughout Indonesia, given the limited budget of the Supreme Court.

Namun, Mahkamah Agung akan terus berjuang agar semua satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di pelosok-pelosok dan pulau-pulau terpencil, bisa memiliki Sarpras IT yang setara dengan pengadilan-pengadilan yang ada di kota-kota besar, sehingga di tahun 2022 yang akan datang, diharapkan tidak ada lagi kendala teknis yang dapat menghambat pelayanan pengadilan bagi para pencari keadilan dalam proses persidangan elektronik.

Hadirin yang saya hormati.

Selanjutnya, saya akan memaparkan capaian-capaian Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam dua bagian besar, yaitu capaian di bidang teknis yudisial dan capaian di bidang kesekretariatan.

Dalam rangka menjalankan fungsi mengatur, serta mendukung proses penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, pada tahun 2021 Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa regulasi sebagai berikut.

Despite this, the Supreme Court will continue to push on to ensure that all judicial bodies in all regions of the country, particularly in the remote areas and isolated islands, are equipped with IT infrastructure that is equal to those enjoyed by courts in the major cities, and thus by 2022, there will no longer be technical impediments that can hamper the delivery of court services to justice seekers through electronic hearings.

Distinguished ladies and gentlemen,

I will now present the achievements of the Supreme Court and subordinate courts that are divided into two broad categories, namely achievements in the technical judicial aspect and the secretarial aspect.

In performing its function of regulating and supporting the conduct of judicial processes that are simple, expeditious, and low-cost, in 2021 the Supreme Court has issued several regulations.

1. **Perma Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim.**

Perma tersebut diterbitkan sebagai payung hukum bagi proses rekrutmen hakim dari jalur CPNS dalam formasi Analis Perkara Peradilan, karena sampai dengan saat ini belum ada mekanisme khusus bagi rekrutmen hakim sebagai pejabat negara, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penambahan jumlah hakim akibat adanya yang pensiun, meninggal dan diberhentikan, maka formasi hakim masih dibuka melalui jalur CPNS.

2. **Perma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;**

PERMA Nomor 2 Tahun 2021 diterbitkan sebagai tindak lanjut atas berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Perma tersebut Terdapat beberapa perubahan, yaitu:

Pertama, mekanisme perhitungan waktu dipercepat dengan menggunakan hari kalender, sedangkan dalam Perma sebelumnya menggunakan hari kerja.

1. **Supreme Court Regulation Number 1 of 2021 on Amendment to Supreme Court Regulation Number 2 of 2017 on the Recruitment of Judges**

The regulation was issued to serve as the legal basis for the recruitment of judges through the Candidate Civil Service channel under the formation of Court Case Analysts, given that as yet there is no specific mechanism in place for the recruitment of judges as state officials, and thus to meet the need for the appointment of new judges to fill the vacancies left by retiring, deceased and discharged judges, position on the bench is still recruited through the Candidate Civil Service channel.

2. **Supreme Court Regulation Number 2 on Amendment to Supreme Court Regulation Number 3 of 2016 on Procedures to File for Objections and Deposit of Compensation with the District Courts in the Acquisition of Land for Public Use;**

Supreme Court Regulation, or PERMA, Number 2 of 2021 was issued to further the promulgation of Law Number 11 of 2020 on Employment Creation. The regulation introduced some changes:

First, the calculation of periods is expedited by using calendar days. In contrast, the previous *Perma* refers to business days.

Kedua, objek penitipan ganti kerugian (konsinyasi) harus diserahkan kepada kepaniteraan saat pendaftaran perkara. Pengaturan dibentuk karena dalam praktiknya seringkali setelah konsinyasi ditetapkan sah dan berharga, pemohon tidak menyerahkan uang penitipan ganti kerugian tersebut, sehingga menimbulkan sengketa baru yang berlarut-larut.

Ketiga, jangka waktu penanganan perkara penitipan ganti kerugian ditentukan 14 hari sesuai dengan Pasal 123 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Perma Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga;

Terdapat beberapa pengaturan baru yang diatur dalam Perma tersebut, yaitu.

Pertama, tentang pengalihan pengajuan dan pemeriksaan keberatan dari sebelumnya ke pengadilan negeri menjadi ke pengadilan niaga.

Kedua, tentang penggunaan administrasi perkara secara elektronik sesuai dengan sistem informasi di pengadilan.

Ketiga, tentang proses penunjukan pengadilan niaga yang berwenang mengadili dalam hal keberatan

Second, compensation that is to be kept with the court must be deposited with the Registrar's office upon registration of the case. This regulation is established due to the frequent instances where a purportedly consigned amount is declared as valid and of value, the plaintiff fails to deposit the corresponding sum, thereby creating a new and protracted dispute.

Third, the timetable for hearing of consigned compensation is set at 14 days under Article 123 of Law Number 11 of 2020 on Job Creation.

3. Supreme Court Regulation Number 3 of 2021 on Procedure for Filing and Hearing Objections Against the Decision of the Business Competition Oversight Commission at the Commercial Court;

New rules have been established under the *Perma*.

First, change of jurisdiction for the filing and hearing of objections from the district court to the commercial court.

Second, the use of electronic means to administrate cases to align with the courts' information system.

Third, a process by which to designate the commercial court having the competence to hear objections filed by

diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pemohon keberatan terhadap Putusan KPPU yang sama.

more than 1 (one) complainant against the same KPPU Decision.

Selain dalam bentuk PERMA, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan beberapa SEMA, sebagai berikut.

In addition to *PERMAs* or Regulations, the Supreme Court has also issued several Circulars or *SEMA*s.

1. **SEMA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga.** Penerbitan SEMA tersebut untuk memberikan petunjuk sementara terkait dengan proses transisi dalam pengajuan keberatan dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga sampai dengan diterbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga.
2. **SEMA Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Tenggang Waktu Penyelesaian Permohonan Penitipan Ganti Kerugian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.** Penerbitan SEMA ini dimaksudkan sebagai petunjuk sementara bagi pengadilan negeri yang memeriksa perkara

1. **Circular Number 1 of 2021 on the Change of Jurisdiction for the Hearing of Objections Against Decisions of the Business Competition Oversight Commission.** The Circular is issued to provide an interim guideline relating to the transition for the filing of objections, initially with the district court, to the commercial court pending the issuance of Supreme Court Regulation Number 3 of 2021 on Procedures for the Filing and Examination of Objections Against Decisions of the Business Competition Oversight Commission.
2. **Supreme Court Regulation Number 2 of 2021 on Time Limit for Rulings on Consignment of Compensation according to Supreme Court Regulation Number 3 of 2016 on Procedures for the Filing of Objections and Deposit of Compensation with the District Court in Cases Involving Acquisition of Land for Public Interest** The issuance of this Circular is meant to provide interim guidelines for district courts presiding over cases involving the deposit of compensations pending

permohonan penitipan ganti kerugian sebelum terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

3. SEMA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Larangan Pungutan Terkait Pengambilan Sumpah dan Janji Advokat. Dalam SEMA tersebut mengandung tiga poin penting, sebagai berikut.

Pertama, pelaksanaan kegiatan pengambilan sumpah atau janji advokat harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;

Kedua, pengadilan tinggi dilarang untuk memungut atau menerima biaya pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji advokat, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu biaya honorarium juru sumpah dan PNBP.

Ketiga, Pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji advokat dilaksanakan di kantor pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya.

issuance of Supreme Court Regulation Number 2 of 2021 on Amendment to Supreme Court Regulation Number 3 of 2016 regarding Procedure for the Filing of Objections and Deposit of Compensation with the District Court in the Acquisition of Land for Public Interest.

3. Supreme Court Circular Number 3 of 2021 on the Ban on Collection of Charges for Taking of Oath by Advocates. The Circular conveys three essential points, as follows.

First, advocate oath-taking ceremonies must be held in a transparent and accountable manner as a means to build integrity zones towards corruption-free areas (WBK) and clean and service-oriented bureaucratic areas (WBBM);

Second, appellate courts are prohibited from collecting or receiving levies for advocate oath-taking, except as otherwise determined by law, namely honorarium for the oath-taking officer and the Non Tax Government Income.

Third, the Oath-taking ceremony for advocates is to be held at the appellate court office located within their area of legal domicile.

SEMA tentang Larangan Pungutan Terkait Pengambilan Sumpah dan Janji Advokat ini, dibuat untuk melengkapi SEMA Nomor 7 Tahun 2020 tentang Larangan Pungutan terkait Pelantikan dan Pembiayaan Kegiatan Dinas Lainnya. Dua SEMA tersebut diterbitkan sebagai upaya Mahkamah Agung untuk membersihkan praktik-praktik pungutan liar di pengadilan dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa.

4. **SEMA Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.** SEMA ini diterbitkan sebagai respons Mahkamah Agung atas beberapa permasalahan dalam penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan. Ada 4 (empat) hal penting yang diatur sebagai berikut: **Pertama**, dalam tindak pidana perpajakan, bagi subjek hukum korporasi, selain dijatuhkan pidana denda dapat dijatuhkan pidana tambahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **Kedua**, dalam hal diajukan praperadilan terhadap penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara praperadilan adalah pengadilan negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan penyidik atau penuntut umum.

The Circular prohibiting the collection of levies for the advocate oath-taking was introduced as a supplement to Supreme Court Circular Number 7 of 2020 on the Prohibition on the Collection of Levies for Inauguration and Funding of Other Official Activities. The two Supreme Court Circulars were issued as a measure taken by the Supreme Court to eliminate illegal levies that prevail at the courts to achieve the creation of clean and dignified judiciaries.

4. **Supreme Court Circular Number 4 of 2021 on the Application of Certain Provisions in the Handling of Tax-Related Crimes.** The Circular was issued as the Supreme Court's response to a number of issues in the handling of cases in the area of tax. There are 4 (four) key rules contained in the Circular, as follows. **First**, concerning tax-related crimes where the defendant is a corporate entity, fines can be supplemented by additional punishments as provided under the relevant legislations. **Second**, with respect to a pretrial motion in a tax-related criminal case, the judicial body competent to hear such motion is the district court, whose jurisdiction encompasses the domicile of the investigator or prosecuting attorney.

Ketiga, ketika korporasi yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana perpajakan mengalami pailit dan/atau bubar, maka tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pengurusnya dan/atau pihak lain atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana.

Keempat, dalam tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dijatuhkan pidana percobaan, dengan alasan jika terdakwa tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, maka terdakwa dipandang sebagai wajib pajak yang tidak beritikad baik.

5. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

SEMA ini berisi tentang kaidah-kaidah hukum yang disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021, baik kaidah yang betul-betul baru, maupun kaidah hasil penyempurnaan atas kaidah hukum yang lama. Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tersebut bertujuan untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum dan konsistensi putusan.

Third, where a corporation involved in a tax-related crime is undergoing bankruptcy and/or dissolution proceedings, it shall not remove the criminal liability of the management and/or other parties for the tax-related crime that was committed.

Fourth, tax-related crimes cannot result in the passing of a verdict of ‘attempted commission of a crime,’ given that when a defendant fails to meet its tax obligations up to the time the case is presented before the court, then the defendant would be considered as a taxpayer acting in bad faith.

5. Supreme Court Circular Number 5 of 2021 on Application of the Resolution of the Supreme Court 2021 Plenary Session as Guidelines for the Performance of Duties of the Courts

The Circular contains the legal principles agreed upon during the Supreme Court 2021 Plenary Session of the Chambers, which include newly introduced principles as well as updates to principles that are already established. The Supreme Court Plenary Session of the Chambers is convened to achieve uniformity of rules and consistency of judgments.

Hadirin yang Saya muliakan.

Selanjutnya, saya akan menyampaikan gambaran penanganan perkara secara umum pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai berikut.

Beban perkara pada Mahkamah Agung tahun 2021 adalah sebanyak 19.408 (sembilan belas ribu empat ratus delapan) perkara, yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 19.209 (sembilan belas ribu dua ratus sembilan) perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun lalu sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara.

Dari jumlah beban tersebut Mahkamah Agung berhasil memutus selama tahun 2021 sebanyak 19.233 (sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh tiga) perkara, sehingga sisa perkara tahun ini adalah sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) perkara. **Jumlah sisa perkara tersebut merupakan rekor terendah yang pernah dicapai sepanjang sejarah Mahkamah Agung.**

Berdasarkan data penyelesaian perkara tersebut, maka rasio produktivitas memutus Mahkamah Agung pada tahun 2021 adalah sebesar 99,10% atau lebih tinggi dari Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, yaitu sebesar 70%.

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2021 berkurang 6,50% dibandingkan dengan tahun 2020, sehingga beban penanganan perkara juga berkurang sebesar 6,52% hal tersebut

Distinguished ladies and gentlemen,

In this part of my address I will present an overview of the case handling situation at the Supreme Court and the subordinate courts.

Caseload of the Supreme Court in 2021 consisted of 19,408 (nineteen thousand four hundred eight) cases, consisting of 19,209 (nineteen thousand two hundred nine) incoming cases, and 199 (one hundred ninety-nine cases carried over from the previous year.

Of the total caseload in 2021, the Supreme Court adjudged 19,233 (nineteen thousand two hundred thirty-three cases, resulting in a pending of 175 (one hundred seventy-five) cases remaining this year. **The number of pending cases is the lowest that the Supreme Court has ever had in its history.**

Given such a rate of case finalization, the case-deciding productivity ratio of the Supreme Court in 2021 is 99.10%, higher than the established key performance indicator of 70%.

The number of cases received by the Supreme Court in 2021 decreased by 6.5% compared to 2020, resulting lower number of caseload by 6.52%, this is also resulting in a corresponding lowering of

mengakibatkan pada jumlah perkara yang diputus juga menjadi berkurang sebesar 6,46%.

Rasio produktivitas memutus perkara mengalami peningkatan sebesar 0,06% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Berkurangnya jumlah perkara masuk tahun 2021 dipengaruhi oleh penurunan jumlah permohonan peninjauan kembali perkara pajak hingga mencapai 33,53%. Namun, untuk perkara perdata, perdata khusus, pidana, pidana khusus, dan perdata agama pada tahun 2021 justru mengalami peningkatan.

Selanjutnya mengenai jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Pada tahun 2021 Mahkamah Agung telah berhasil mengirim salinan putusan sebanyak 21.586 (dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam) perkara. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa rasio penyelesaian perkara pada tahun 2021 adalah sebesar 112,37%.

Jumlah perkara yang diputus Mahkamah Agung di bawah 3 bulan sebanyak 18.805 (delapan belas ribu delapan ratus lima) perkara dari total sebanyak 19.233 (sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh tiga) perkara atau sebesar 97,77% Jumlah tersebut telah melampaui capaian kinerja tahun 2020, yaitu sebesar 96,65%.

decided cases by 6.46%.

The productivity ratio experiences an increase by 0.06% compared to 2020. The smaller number of incoming cases in 2021 was partly due to fewer petitions for case review (peninjauan kembali) of tax-related cases by 33.53%. However, the number of civil, Special civil, criminal, special criminal, and religious civil cases brought before the Supreme Court have shown an increase in 2021.

The subsequent part of this report deals with case files that have been finalized and returned to the originating court. Throughout 2021 the Supreme Court has delivered its judgments with respect to 21,586 (twenty-one thousand five hundred eighty-six) cases. This number means that the clearance ratio of 112.37% in 2021.

The number of cases that were able to be decided by the Supreme Court within a period of fewer than three months is 18,805 (eighteen thousand eight hundred and five) cases out of a total of 19,233 (nineteen thousand two hundred thirty-three) cases, 97.77%. This surpasses the achievements in 2020, which yielded a rate of 96.65%.

Uraian di atas menunjukkan bahwa semua parameter pengukuran kinerja penanganan perkara pada Mahkamah Agung tahun 2021 telah berhasil melampaui semua target yang ditetapkan **dan sebagian besar berhasil mencatatkan rekor sebagai capaian terbaik sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung.**

Pada Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan dan Pengadilan Pajak, beban perkara pada tahun 2021 sebanyak 51.352 (lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua) perkara yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 41.342 (empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua) perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2020 sebanyak 10.010 (sepuluh ribu sepuluh) perkara.

Dari jumlah tersebut perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak sebanyak 36.678 (tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan) perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak adalah sebesar 71,48%. Adapun kinerja penanganan perkara pengadilan tingkat pertama adalah sebagai berikut.

Beban perkara tahun 2021 sebanyak 2.767.247 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh dua ratus empat puluh tujuh) perkara, terdiri dari perkara masuk sebanyak 2.691.649 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu enam ratus empat

The elaboration above demonstrates that all performance parameters in the evaluation of case handling by the Supreme Court in 2021 have exceeded all set targets and **most constitute best performance record throughout the history of the Supreme Court.**

With regard to the appellate courts of the four areas of the judiciary and the Tax Court, the caseload in 2021 consisted of 51,352 (fifty-one thousand three hundred fifty-two) cases, made up of 41,342 (forty-one thousand three hundred forty-two) incoming cases, and an additional 10,010 (ten thousand ten) cases carried over from 2020.

Of the total cases above, 36,678 (thirty-six thousand six hundred seventy-eight) cases have been decided by the appellate courts and the tax court. As such, case completion productivity ratio at the appellate courts and tax court is 71.48%. Case handling performance of the first instance courts are as follows.

The caseload in 2021 amounted to 2,767,247 (two million seven hundred sixty-seven thousand two hundred forty-seven) cases, consisting of 2,691,649 (two million six hundred ninety-one six hundred forty-nine) incoming cases and an

puluh sembilan) perkara ditambah sisa perkara tahun 2020 sebanyak 75.598 (tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan) perkara.

Dari jumlah tersebut perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama sebanyak 2.652.790 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh) perkara dan perkara yang dicabut sebanyak 53.147 (lima puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh) perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2021 sebanyak 61.310 (enam puluh satu ribu tiga ratus sepuluh) perkara.

Dengan demikian, rasio produktivitas memutus perkara di pengadilan tingkat pertama adalah sebesar 97,78%.

Hadirin yang Saya hormati.

Selain gambaran penanganan perkara secara umum saya akan menggambarkan juga kinerja penanganan perkara melalui sistem peradilan elektronik (*e-Court*) sebagai berikut.

Pada tahun 2020, jumlah perkara perdata, perkara perdata agama, dan perkara tata usaha negara yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* di pengadilan tingkat pertama sebanyak 225.072 (dua ratus dua puluh lima ribu tujuh puluh dua) perkara atau meningkat sebesar 20,37% dibandingkan tahun 2020. Dari jumlah tersebut sebanyak 11.817 (sebelas ribu delapan ratus tujuh belas) perkara telah disidangkan secara *e-Litigation*.

additional 75,598 (seventy-five thousand five hundred ninety-eight) cases carried over from 2020.

Of the above total, there were 2,652,790 (two million six hundred fifty-two seven hundred ninety) cases that were decided by the courts of first instance, while 53,147 (fifty-three thousand one hundred forty-seven) cases were withdrawn, resulting in 61,310 (sixty-one thousand three hundred ten) remaining cases for that year.

In that regard, case completion productivity ratio of the courts of first instance is 97.78%.

Distinguished ladies and gentlemen,

In addition to the overview on case processing, I will also present the case handling performance that utilized the electronic court system (*e-Court*).

Throughout 2020, the total number of civil cases, religious civil cases, and state-administrative cases registered through the *e-Court* application was 225,072 (two hundred twenty-five thousand seventy-two) cases, increasing by 20.37% compared to 2020. Of such total, 11,817 (eleven thousand eight hundred seventeen) cases were tried using the *e-Litigation* application.

Sementara itu, pada Pengadilan Tingkat Banding jumlah perkara banding yang telah didaftarkan dengan menggunakan aplikasi *e-Court* pada tahun 2021 sebanyak 1.876 (seribu delapan ratus tujuh puluh enam) perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.712 (seribu tujuh ratus dua belas) perkara telah selesai diputus.

Jumlah Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya yang menggunakan layanan *e-Court* sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebanyak 208.851 (dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh satu) pengguna yang terdiri dari 48.002 (empat puluh delapan ribu dua) Pengguna Terdaftar dari kalangan Advokat dan 160.849 (seratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan) Pengguna Lainnya dari kalangan perorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil.

Bagi perkara pidana, (di luar perkara pelanggaran lalu lintas) perkara pidana militer, dan perkara jinayat sejak berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik tercatat sebanyak 129.575 (seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima) perkara telah diselesaikan melalui sistem persidangan elektronik. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan elektronik telah berjalan

Meanwhile, at the courts of appeal, total appealed judgements registered using the *e-Court* application in 2021 amounted to 1,876 (one thousand eight hundred seventy-six) cases. Of this total, 1,712 (one thousand seven hundred twelve) cases were given judgments.

Total Registered Users and Other Users that made use of the *e-Court* application up to 31 December 2021 was 208,851 (two hundred eight thousand eight hundred fifty-one), consisting of 48,002 (forty-eight thousand two) Registered Users who are lawyers and 160,849 (one hundred sixty thousand eight hundred forty-nine) Other Users from among the public, government, legal entities, and incidental attorneys-in-fact.

With respect to criminal cases (excluding cases of traffic violations), military criminal cases, and *jinayah* cases, following the promulgation of Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 on Electronic Administration and Trial of Cases, a total of 129,575 (one hundred twenty-nine thousand five hundred seventy-five) cases were awarded judgements through the electronic trial system. This demonstrates that the electronic court system is operating

secara efektif pada semua jenis perkara di empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Selain capaian-capaian yang telah diuraikan di atas Mahkamah Agung juga terus mendorong upaya penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi pada perkara perdata dan perkara perdata agama serta penyelesaian melalui diversifikasi pada perkara tindak pidana anak. Selama tahun 2021 terdapat 10.151 (sepuluh ribu seratus lima puluh satu) perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi atau mengalami kenaikan dari tahun 2020 yaitu sebanyak 5.177 (lima ribu seratus tujuh puluh tujuh) dan terdapat 30 (tiga puluh) perkara tindak pidana anak yang diselesaikan melalui proses diversifikasi atau mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebanyak 24 (dua puluh empat) perkara.

Sementara itu, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk kemudahan berusaha di Indonesia Mahkamah Agung juga terus melakukan optimalisasi terkait kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong percepatan penyelesaian perkara dengan nilai gugatan yang kecil melalui mekanisme gugatan sederhana (*Small Claim Court*).

Pada tahun 2021 perkara gugatan sederhana yang berhasil diselesaikan di pengadilan negeri sebanyak 8.028 (delapan ribu dua puluh delapan) perkara, sedangkan perkara gugatan sederhana

effectively for all types of cases at the four areas of the judiciary operating under the auspice of the Supreme Court.

In addition to the achievements outlined above, the Supreme Court continues to encourage the amicable settlement of cases through mediation for civil cases and religious civil cases and through diversion of juvenile crimes.

In 2021 there were 10,151 (ten thousand one hundred fifty-one) cases that were settled out of court through mediation, which is an increase by 5,177 (five thousand one hundred seventy-seven) cases, while 30 (thirty) juvenile delinquency cases were settled through diversion, increasing by 24 (twenty-four) cases from 2020.

Meanwhile, in support of the governments effort to augment ease of doing business in Indonesia, the Supreme Court have also conducted optimization measures with regard to policies that can accelerate the adjudication of cases that feature small claims value through the small claims court.

In 2021 the number of small claims that were adjudicated by the district courts totaled 8,028 (eight thousand twenty-eight) cases, while small claim cases that involve shariah economic disputes that

terkait sengketa ekonomi syari'ah yang berhasil diselesaikan oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah sebanyak 303 (tiga ratus tiga) perkara.

Hadirin yang saya muliakan.

Tingkat kepuasan publik kepada lembaga peradilan salah satunya dapat diukur dari jumlah upaya hukum yang diajukan pada masing-masing tingkat peradilan.

Di luar perkara yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat, perkara pelanggaran lalu lintas (tilang), serta perkara perdata permohonan, selama tahun 2021 yang diajukan upaya hukum banding tercatat sebanyak 16.377 (enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) perkara atau sebesar 2,71% dari jumlah keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan para pihak terhadap putusan pengadilan tingkat pertama adalah sebesar **97,29%**.

Di tingkat banding perkara yang diajukan kasasi adalah sebanyak 13.678 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan) perkara atau sebesar 49,15% dari keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat banding. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan para pihak atas putusan pengadilan tingkat banding adalah sebesar **50,85%**.

Pada tingkat kasasi putusan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak

were determined by the religious courts/ shariah tribunals amounted to 303 (three hundred three) cases.

Distinguished guests, ladies, and gentlemen.

The level of public satisfaction with the judiciary can be measured by the number of legal actions lodged at each level of the court.

Other than with respect to cases that are heard through quick dispositions, traffic violation cases (traffic ticket challenges), and cases of civil petition, throughout 2021 cases that were the subject of appeal totaled 16,377 (sixteen three hundred seventy-seven) cases or 2.71% of the total cases adjudged by the courts of the first instance. This indicates that the parties' satisfaction of the judgments of the first level courts reached **97.29%**.

At the appellate level, cases filed for cassation numbered 13,678 (thirteen thousand six hundred seventy-eight) cases, or 49.15% of the total cases resolved at the appellate level, indicating a level of satisfaction among the parties of the judgments of the appellate courts of **50.85%**.

At the cassation level, cases submitted for case review totaled 1,338 (one thousand

1.338 (seribu tiga ratus tiga puluh delapan) perkara atau sebesar 9,78% dari keseluruhan putusan kasasi. Dengan kata lain, tingkat kepuasan terhadap putusan kasasi adalah sebesar **90,22%**.

Selanjutnya, saya akan menyampaikan jumlah pidana denda dan uang pengganti berdasarkan putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara pelanggaran lalu lintas, tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dan perkara-perkara pidana lainnya sebagai berikut.

Jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 21.995.131.485.546,20 (dua puluh satu triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar seratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam koma dua puluh rupiah), sedangkan jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang berkekuatan hukum tetap di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer adalah sebesar 51.905.031.913.135,00 (lima puluh satu triliun sembilan ratus lima miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

Selain itu, kontribusi dari penarikan PNPB pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan

three hundred thirty-eight) cases or 9.78% of the total cassation judgments. In other words, level of satisfaction with cassation judgments is **90.22%**.

Further, I will present data on fines and compensations by verdicts having permanent legal force relating to traffic offenses, corruption, drugs, forestry, child protection, fishery, money laundering, and other criminal cases.

The total amount of fines and compensations ordered to be paid by virtue of Supreme Court judgments is Rp 21,995,131,485,546.20 (twenty-one trillion nine hundred ninety-five billion one hundred thirty-one million four hundred eighty-five thousand five hundred forty-six point two zero rupiah), while fines and compensations ordered by courts of first instance judgments having permanent legal force within the general courts and the military courts amounted to Rp. 51,905,031,913,135.00 (fifty-one trillion nine hundred five billion thirty-one million nine hundred thirteen thousand one hundred thirty-five rupiah).

In addition, the contribution of non-tax state revenues in 2021 collected under Government Regulation Number 5 of 2019 on the Types and Rate of Non-

Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan adalah sebesar Rp76.252.122.669,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

Hadirin yang saya hormati.

Untuk capaian kinerja Mahkamah Agung di bidang Kesekretariatan saya akan uraikan sebagai berikut.

1. Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan

Pada tahun 2020 total pagu awal Mahkamah Agung yaitu sebesar Rp11.238.947.386.000,00 (sebelas triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), kemudian mengalami penyesuaian anggaran (*refocusing*) sebesar Rp524.061.738.000,00 (lima ratus dua puluh empat miliar enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan mendapatkan hibah sebesar Rp8.612.260.000,00 (delapan miliar enam ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) serta penggunaan PNBPN sebesar Rp4.354.717.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga, total pagu anggaran menjadi Rp10.727.852.625.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh tujuh

Tax State Revenue that applies to the Supreme Court and subordinate courts totaled Rp76,252,122,669.00 (seventy-six billion two hundred fifty-two million one hundred twenty-two thousand six hundred sixty-nine rupiah).

Distinguished ladies and gentlemen,

Regarding the Supreme Court's performance in secretarial matters, I submit to you the following.

1. Budget Spending and Financial Management Performance

In 2020 total initial budget allocated to the Supreme Court was Rp11,238,947,386,000.00 (eleven trillion two hundred thirty-eight billion nine hundred forty-seven million three hundred eighty-six thousand rupiah), which was subsequently subject to a 'refocusing' to become Rp524,061,738,000.00 (five hundred billion sixty-one million seven hundred thirty-eight thousand rupiah). The Supreme Court was also the recipient of grants totaling Rp8,612,260,000.00 (eight billion six hundred twelve million two hundred sixty thousand rupiah) and utilized its non-tax state revenue amounting to Rp4,354,717,000.00 (four billion seven hundred seventeen thousand rupiah), resulting in a total budget of Rp10,727,852,625,000.00 (ten trillion seven hundred twenty-seven million eight hundred eighty-

miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dari total pagu tersebut, realisasi anggaran Mahkamah Agung pada tahun 2021 sebesar Rp10.509.269.716.263,00 (sepuluh triliun lima ratus sembilan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) atau **97,96%**.

Dalam rangka modernisasi di bidang pengelolaan anggaran dan barang milik negara, Mahkamah Agung telah meluncurkan dua aplikasi terbaru hasil kreasi dari putra putri terbaik Mahkamah Agung, yaitu Aplikasi e-BIMA atau *elektronik Budgeting Implementation, Monitoring and Accountability*, dan aplikasi e-SADEWA atau *Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*. Dua Aplikasi tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja bagi penatakelolaan keuangan negara serta barang milik negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Atas kerja keras dari seluruh komponen kesekretariatan, maka Mahkamah Agung kembali berhasil meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-9 kalinya secara berturut-turut,

two million six hundred twenty-five thousand rupiah).

From the total budget amount, spending by the Supreme Court in 2021 was Rp10,509,269,716,263.00 (ten trillion five hundred nine billion two hundred sixty-nine million seven hundred sixteen thousand two hundred sixty-three rupiah) or **97.96%** of the budget.

In the effort to modernize the management of budget and state assets, the Supreme Court has rolled out two new applications developed internally by the best minds of the Supreme Court, namely the e-Bima or *Electronic Budgeting Implementation, Monitoring and Accountability* application, and E-SADEWA or *Electronic State Asset Development and Enhancement Work* application. The two applications contributed significantly to the enhancing performance in managing state finance and state assets within the Supreme Court and subordinate courts.

As the fruit of the hard work of all secretarial personnel, the Supreme Court has been awarded an unqualified opinion for the ninth consecutive time for its success in following up on 100% of the recommendations

capaian tersebut juga diikuti oleh keberhasilan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan 100% tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung serius dalam menjalankan prinsip akuntansi yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara.

- 2. Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM**
Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan tata laksana organisasi yang transparan dan akuntabel melalui program pembaruan peradilan.

Di bidang pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM capaian Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada tahun 2021, sebanyak 43 (empat [ulun tiga] satuan kerja yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), salah satunya diraih oleh satuan kerja setingkat Eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan 5 (lima) Satuan Kerja mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), salah satunya diraih oleh satuan kerja setingkat Eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

arising from BPK's audit. The opinion is a testament to the seriousness with which the Supreme Court implements transparent and accountable accounting in its management of state finance.

- 2. Bureaucratic Reform and Integrity Zones towards Corruption-Free Areas and Clean and Service-Oriented Bureaucracy Area**

The Supreme Court and the subordinate courts have a solid commitment to build a transparent and accountable organizational management through the judicial reform program.

In developing Integrity Zones towards creating WBKs and WBBMs, the Supreme Court and the subordinate courts in 2001 have established 43 (forty-three) work units that managed to gain WBK status, among which is an Echelon I unit, namely the Directorate General of General Courts, while 5 (five) work units acquired WBBM (Clean and Service-Oriented Bureaucracy Area), one of which is the Directorate General of Religious Courts.

Dengan demikian, sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBK dan 14 (empat belas) satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBBM dan atas capaian tersebut untuk kedua kalinya Ketua Mahkamah Agung dianugerahi sebagai Pemimpin Perubahan Tahun 2020 dan tahun 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Capaian Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Mahkamah Agung melalui Balitbang Diklat Kumdil telah melakukan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan terhadap 17.722 (tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh dua) aparatur yang terbagi kepada dua bidang kompetensi pelatihan, yaitu pelatihan di bidang teknis serta pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan. Realisasi program pelatihan aparatur peradilan pada tahun 2021 telah mampu melampaui target yang direncanakan, yaitu untuk pelatihan teknis yudisial berhasil melatih sebanyak 4.244 (empat ribu dua ratus empat puluh empat) aparatur atau sebesar 115,64% dari target yang direncanakan, yaitu sebanyak 3.670 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh) aparatur.

From 2018 up to 2021 there have been 198 (one hundred ninety-eight) work units that received WBK status and 14 (fourteen) that received WBBM status. For such achievement, the Chief Justice of the Supreme Court has won the Leader of Change Award for 2020 and 2021 by the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform.

3. Achievements in Human Resources Management

The Supreme Court through its Legal and Judicial Research/Development and Training/Education Body (Balitbang Diklat Kumdil) has conducted competency building of its personnel through the training of 17,722 (seventeen thousand seven hundred twenty-two) people in two areas of competencies, namely technical skills and managerial and leadership skills.

Implementation of training for court staff in 2021 has exceeded the planned target. More specifically, technical judicial training have been delivered to 4,244 (four thousand two hundred forty-four) civil servants or approximately 115.64% of the set targets, namely 3,670 (three thousand six hundred seventy) civil servants.

Sementara itu, untuk pelatihan manajemen dan kepemimpinan telah berhasil melatih sebanyak 13.478 (tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan) aparatur atau sebesar 223,51% dari target yang direncanakan, yaitu 6.030 (enam ribu tiga puluh) aparatur. Jumlah tersebut sekaligus telah mencatatkan rekor untuk kedua kalinya pada Musieum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas prestasi dalam pelaksanaan Diklat Aparatur terbanyak sepanjang tahun 2021.

Hadirin yang saya muliakan.

Perlu saya sampaikan juga terkait kinerja pengawasan dan penegakan disiplin aparatur pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagai berikut.

Pada tahun 2021, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan telah menerima pengaduan sebanyak 3.069 (tiga ribu enam sembilan) pengaduan. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.802 (dua ribu delapan ratus dua) pengaduan telah selesai diproses, sedangkan sisanya sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) pengaduan masih dalam proses penanganan.

Sepanjang tahun 2021 Mahkamah Agung bersama-sama dengan Komisi Yudisial telah menggelar Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebanyak 3

Managerial and leadership training have built the capacity of 13,478 (thirteen thousand four hundred seventy-eight) personnel or 223.51% of the planned target of 6,030 (six thousand thirty) participants. This total is the second entry into the Indonesian Record Museum (MURI) for the most staff training sessions conducted in the year 2021.

Distinguished ladies and gentlemen,

It is also necessary for me to convey on this occasion the disciplinary supervision and enforcement being conducted within the Supreme Court and subordinate courts.

Throughout 2021 the Supreme Court, through its Supervisory Body, has received 3,069 (three thousand sixty-nine) complaints. Of this total, 2,802 (two thousand eight hundred two) have been resolved, while 267 (two hundred sixty-seven) are still in the resolution process.

In 2021 the Supreme Court, together with the Judicial Commission, have jointly convened 3 (three) Ethics Board Hearings that resulted in the passing of decision that

(tiga) kali dengan hasil akhir hukuman disiplin berupa sanksi berat masing-masing dengan hukuman Hakim Non Palu selama 2 tahun.

Menyangkut surat rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin yang berasal dari Komisi Yudisial yang diajukan ke Mahkamah Agung pada tahun 2021 berjumlah 60 rekomendasi. Sebanyak 3 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi, sedangkan sebanyak 57 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan alasan sebagai berikut:

- 54 rekomendasi terkait dengan teknis yudisial; dan
- 3 rekomendasi karena terkait dengan substansi putusan.

Sedangkan jumlah dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan aparatur peradilan dalam periode tahun 2021 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) hukuman disiplin, yang terdiri dari hukuman berat, hukuman sedang dan hukuman ringan, dengan rincian sebagai berikut:

- Hakim dan Hakim Ad Hoc sebanyak 129 sanksi yang terdiri dari 25 sanksi berat, 22 sanksi sedang dan 82 sanksi ringan.
- Pejabat teknis yang terdiri dari Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti sebanyak 78 sanksi yang terdiri dari 30 sanksi berat, 20 sanksi sedang dan 28 sanksi ringan

banned the complainees from presiding over cases for two years.

Concerning recommendations of disciplinary actions made by the Judicial Commission to the Supreme Court in 2021, 60 of such recommendation has been submitted during that year. Three of the recommendations were followed by the imposition of sanctions, while 57 recommendations were not actionable due to the following reasons:

- 54 recommendations relate to technical judicial aspect; and
- 3 recommendations relate to the substantive element of judgements.

Meanwhile, in 2021, 250 (two hundred fifty) disciplinary actions were taken, consisting of severe, moderate and minor sanctions, which can be broken down as follows.

- 129 sanctions were imposed on judges and ad-hoc judges, consisting of 25 severe sanctions, 22 moderate sanctions, and 82 minor sanctions.
- 78 sanctions were imposed on registrars, deputy registrars, substituting registrars, bailiffs, and deputy substituting bailiffs, consisting of 30 severe sanctions, 20 moderate sanctions and 28 minor sanctions.

- Pejabat struktural dan pejabat kesekretariatan sebanyak 26 sanksi yang terdiri dari 6 sanksi berat, 6 sanksi sedang dan 14 sanksi ringan.
- Staf dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 17 sanksi yang terdiri dari 10 sanksi berat, 4 sanksi sedang dan 3 sanksi ringan.
- 26 sanctions were imposed on structural and secretarial officials, consisting of 6 severe sanctions, 6 moderate sanctions, and 14 minor sanctions.
- 17 sanctions were imposed on non-civil servant government employees (PPNPN), consisting of 10 severe sanctions, 4 moderate sanctions, and 3 minor sanctions.

Hadirin yang saya hormati.

Demikianlah secara garis besar hasil capaian kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2021. Kami menyadari, pasti masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki, namun Mahkamah Agung selalu optimis dan tidak akan pernah berhenti untuk selalu berusaha menjadi lebih baik.

Semangat, kerja keras, dan cita-cita yang besar menjadi modal utama untuk meniti langkah sukses berikutnya dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung melalui modernisasi peradilan. Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Mahkamah Agung Negara-Negara Sahabat, Perwakilan Negara Sahabat, Lembaga-Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya, Mitra Perbankan, Taspen, Lembaga-Lembaga

Distinguished ladies and gentlemen,

Such is the overview of the Supreme Court's achievements and performance during 2021. We realize that there are still inadequacies that need to be addressed. However, the Supreme Court is optimistic that it shall never stop its quest to continuously improve itself.

A strong spirit, hard work, and high aspirations are the principal assets to achieve upcoming successes to create a grand and dignified Supreme Court through modernization of the judiciary. I convey my highest appreciation and gratitude to the Supreme Courts of our Foreign State Friends, representatives of our Foreign State Friends, State Institutions, Ministries and Non-Ministerial State Institutions, Regional Governments, Universities, and other educational institutions, banking partners, Taspen, partner institutions of the Supreme Court, from within the

yang menjadi mitra Mahkamah Agung, baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri, Media Massa, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi-organisasi Advokat, pihak swasta dan semua pihak lainnya yang telah berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing.

Secara khusus saya juga menyampaikan terima kasih kepada Para Pimpinan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung beserta jajarannya, Sekretaris Mahkamah Agung beserta seluruh perangkatnya, Para Direktur Jenderal dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan, dan Para Kepala Badan pada Mahkamah Agung, beserta seluruh warga peradilan di seluruh Indonesia atas kerja keras dan pengabdian yang tulus dalam melaksanakan tugas peradilan sehingga kita mampu meraih capaian-capaian yang sangat membanggakan ini.

Sebelum menutup pidato ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan bagi semua warga peradilan di seluruh Indonesia.

“Fase terberat selama pandemi telah kita lalui, kesulitan dan keprihatinan juga telah kita jalani. Saat ini, waktunya kita untuk bangkit dan melangkah maju demi terwujudnya Peradilan Indonesia Yang Agung dan modern.”

country as well as abroad, the media, civil society organizations, non-governmental organizations, advocacy organizations, the private sector, and related parties who have given their contribution and played their respective roles.

In particular, I wish to convey my appreciation to the leadership of the Supreme Court, the justices, ad-hoc judges serving at the Supreme Court, the Registrar of the Supreme Court and staff, the Secretary of the Supreme Court and staff, the Director Generals of the four areas of the judiciary, and the heads of bodies within the Supreme Court, and the entire judicial community throughout Indonesia for their hard work and sincere dedication in the performance of their judicial duties, allowing us to attain our remarkable achievements.

Before I conclude my address, I would like to send a message to all the people working within the judiciaries in Indonesia.

“The most difficult part of the pandemic is behind us. Hardship and sadness we have suffered. Now it is the time for us to rise and move forward to create a great and dignified and modern judiciary in Indonesia.”

Akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa semoga musibah pandemi Covid-19 ini dapat segera berakhir dan kita semua bisa menjalani kehidupan secara normal kembali. *Aamiin Ya Robbal'alam, Wabillahittau'alaikum Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

In conclusion, I ask that we all pray that the Covid-19 pandemic will soon come to an end and that we can all resume our normal lives. *Aamiin Ya Robbal'alam, Wabillahittau'alaikum Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

**»»»» Akselerasi
Perwujudan Peradilan Modern**

**Accelerated Creation
of a Modern Judiciary**



Mahkamah Agung Republik Indonesia
The Supreme Court of the Republic of Indonesia

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
Jakarta Pusat - DKI Jakarta, Indonesia 10110
(021) 3843348, 3810350, 3457661
info@mahkamahagung.go.id

